

**Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik
(Umar Kamahi)**

**TEORI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT:
TANTANGAN BAGI SOSIOLOGI POLITIK**

Oleh:

Umar Kamahi

(Dosen UNDAMA Kupag)

ABSTRAK

Kekuasaan kerap diperbincangkan dalam wacana politik atau sosiologi politik. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Foucault tidak menolak cara pandang semacam ini, tapi hal itu tidak cukup untuk memahami praktik penundukan yang tak kasat mata. Pandangan yang lebih kritis tentang kekuasaan muncul dalam kajian budaya. Konsep Gramsci tentang hegemoni sering digunakan untuk membongkar kemapanan budaya dalam proses dominasi yang terselubung. Dalam penjelasan yang lebih canggih, kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik, yang mana hal ini dikonsepsikan Foucault sebagai *governmentality*. Tulisan ini membahas konsep inti dalam pemikiran Foucault tentang kekuasaan. Dalam tulisan ini diuraikan pula perdebatan tentang relasi dominasi dan relasi kekuasaan yang sering dipahami secara tumpang-tindih dalam kajian politik atau sosiologi politik.

Kata kunci: Power, Domination, Foucault, Governmentality, Cultural Studies

A. PENDAHULUAN

Karya-karya Foucault menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan telah menjadi pokok perhatiannya sepanjang karier intelektualnya. Foucault selama ini dikenal sebagai seorang filsuf, juga sebagai sejarawan. Namun, pemikirannya memiliki pengaruh yang luas terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya termasuk antropologi dan sosiologi. Foucault tidak mengkaji sejarah untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada suatu jaman tertentu, melainkan kajian sejarah yang dilakukannya adalah sejarah tentang masa kini (*history of the present*).

Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini (*what is today?*), yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan sejarah masa lalu dilakukan untuk mencari retakan suatu zaman (*discontinuity*) sebagai usaha untuk menemukan rezim pengetahuan (*episteme*) apa yang berkuasa pada masa tertentu (*archeology of knowledge*), dan bagaimana beroperasinya kekuasaan (*geneology of power*) itu kini. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat, tetapi menyebar (*omnipresent*) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan.

Disiplin merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu. Beroperasinya kekuasaan yang dilegitimasi oleh rezim pengetahuan tertentu sebagai normalisasi itu juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas, yakni terhadap tubuh sosial (*population*). Persoalan ini dibahas oleh Foucault secara intensif

dalam beberapa tulisan dan ceramahnya sebagai suatu konsep *governmentality*. Ini tentu saja berbeda dari pengertian kekuasaan yang umum dipahami dalam sosiologi politik sebagai suatu atribut dengan kajian yang bersifat makro. Tulisan ini mengkaji bagaimana teori kekuasaan Foucault itu dibangun, bagaimana ia menjadi tantangan bagi sosiologi politik dan kajian kebudayaan, serta bagaimana tantangan itu direspons oleh keduanya.

Penelitian ini disusun dari tinjauan literatur terhadap karya-karya Foucault, karya-karya para teoretisi yang memetakan pemikiran sosial Foucault, dan riset-riset yang berangkat dari pendekatan Foucault. Dari upaya mengompilasi dan memperbandingkan berbagai karya tersebut, diperoleh benang merah dari cara pandang sistematis Foucault perihal kekuasaan.

B. PEMBAHASAN

1. Kekuasaan dan Pengetahuan

Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan menjadi tema sentral dalam seluruh studi yang dilakukan Foucault sepanjang karier intelektualnya. Meski demikian, dari seluruh karyanya, jarang sekali sebenarnya Foucault menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan secara eksplisit. Beberapa tulisan dan wawancara dengan Foucault yang terhimpun dalam sebuah buku *Power/Knowledge* berusaha menunjukkan relasi kekuasaan dan pengetahuan secara eksplisit. Namun, baik melalui wawancara maupun tulisan dan ceramah kuliahnya, tidak ada pembicaraan secara spesifik hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan selain ia menjadi simpulan tematik dari editor buku tersebut. Persoalan ini pada akhirnya menyulitkan untuk memahami hubungan kekuasaan dan pengetahuan, meski Foucault sebenarnya juga telah menunjukkan hubungan tersebut dalam karya-karya awalnya. Menurutnya, apa lagi yang dibicarakan dalam tema-tema seperti kegilaan, disiplin, dan seksualitas selain sebagai beroperasinya jalinan antara kekuasaan dengan pengetahuan. Foucault lebih intens membicarakan kekuasaan secara tematik daripada membicarakan pengetahuan. Oleh karena itu, pada bagian ini, tema tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan akan didiskusikan bertolak dari konsepsi Foucault tentang kekuasaan.

Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis.

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan

beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Cronin (1996) menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantif—tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap—subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.

Yang pertama, pandangan tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain, abai terhadap fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (*sovereignty*) dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (*legitimate*) dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus. Akan tetapi, menurut Foucault, konsep kekuasaan ini tidak dapat menangkap kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan *sovereign power* tetapi *disciplinary power*.

Disciplinary power bukan konsep tentang kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain melainkan ia berfungsi dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, tetapi mengenai normalisasi kelakuan yang didisain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh.

Yang kedua, terjadi pula pergeseran fokus analisa kekuasaan, dari analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh. *Disciplinary power* beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (*vehicle of power*). *Sovereign power* itu negatif, menundukkan perilaku melalui kepatuhan terhadap hukum, sementara *disciplinary power* produktif, mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh. Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan.

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

Demikian menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus dipahami: "... power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another;

and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony." (Foucault 1990: 92-93).

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya.

Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan kepemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidankampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun. Dalam bukunya *The History of Sexuality Vol. I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni (1990:94-95):

- a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
 - b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
 - c. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
 - d. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
 - e. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.
2. Pengetahuan sebagai Bentuk Kekuasaan

Jauh sebelum Foucault berbicara secara eksplisit mengenai isu kekuasaan, fokus perhatian pada karya-karya awalnya adalah pada sejarah pengetahuan. Namun yang menjadi perhatiannya bukan penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin ilmu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai sebuah *episteme*, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu. Penyelidikan sejarah ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yakni konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan, terorganisasi secara tematis sehingga ia menjadi otoritatif dan *legitimate* dalam menerangkan segala sesuatu. Struktur pengetahuan yang otoritatif dan *legitimate* ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertindak sebagai sebuah rezim pengetahuan. Dalam karya awalnya, *The Archeology of Knowledge*, struktur pengetahuan ini disebut pula sebagai suatu formasi wacana.

Pengertian arkeologi pada karya tersebut tidak merujuk sebagai suatu metode penggalian sejarah antropologis yang mengandaikan bahwa sejarah (dalam hal ini adalah sejarah pengetahuan) berkembang secara linear. Suatu bentuk pengetahuan, dalam pandangan

Foucault, dari masa ke masa bukan suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana. Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai *episteme*. *Episteme* merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman. Dalam studinya tentang kegilaan, misalnya, Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaannya terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan.

Pemantapan pengetahuan sehingga ia menjadi khas, melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan yang tidak lepas dari bagaimana pengetahuan yang ilmiah berelasi dengan pengetahuan awam. Pemantapan itu berlangsung pada level wacana (*discourse*). Sebagai sebuah *episteme*, dalam hubungannya dengan pengetahuan ilmiah ia tidak lagi berdiri sebagai suatu cara pandang dalam melihat perbedaan dan pemisahan antara yang benar dari yang salah, melainkan pemisahan dalam ranah praktis antara yang mungkin dari yang tidak mungkin dilakukan atau dipikirkan dengan pendasaran pengetahuan yang ilmiah. Melalui *episteme*, strategi beoperasinya kekuasaan dalam pengetahuan dapat diketahui. Foucault menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan *episteme*, yakni mengetahui bagaimana terjadinya perubahan rezim pengetahuan dari suatu masa. Dan tentu saja terjadinya perubahan itu melibatkan beroperasinya kekuasaan.

Secara implisit, Foucault sebenarnya ingin mengatakan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault yang terinspirasi oleh Nietzsche, tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan benar yang final dan bersifat universal. Kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan *legitimate* belaka, seperti pada kasus Galileo.

Klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik sosial. Itulah kenapa dalam pandangan Foucault kekuasaan itu tidak beroperasi secara negatif melalui aparatus yang koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya. Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan efek dari kekuasaan tersebut. Ia tidak bisa dipisahkan dari aparatus yang dapat mengendalikan apakah pengetahuan itu otoritatif atau tidak. Distingsi antara yang benar dan yang salah juga melibatkan aparatus ilmiah yang memproduksi pengetahuan melalui ritus-

ritus kebenaran, yakni melalui dasar empiris sebagai legitimasi bagi kebenaran pengetahuan itu.

Definisi-definisi ilmiah secara jelas juga menunjukkan efek beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana. Definisi psikiatri tentang mental mengubah praktik penanganan orang gila. Definisi kedokteran tentang penyakit, menyebabkan isolasi, pengasingan, dan mengubah hubungan sosial. Konsep tentang kecantikan menghasilkan salon, diet, cara makan, fitness, pakaian, dan kursus-kursus. Agama menghasilkan penyeragaman, baik pakaian, bahasa, perilaku, juga menghasilkan diskriminasi. Pembagian kerja membuat diskriminasi terhadap seksualitas, efisiensi, dan tradisi.

Rezim wacana yang bersandar pada definisi-definisi ilmiah itu menggambarkan disposisi suatu pengetahuan pada masa tertentu yang berimplikasi terhadap praktik sosial. Dengan demikian, setiap masa memiliki watak pengetahuan yang khas dan definisi kebenaran yang khas pula. Foucault menunjukkan terjadinya pergeseran-pergeseran formasi wacana itu dalam penyelidikannya tentang kegilaan, penyakit, kesejahteraan, dan seksualitas yang berimplikasi pada perubahan-perubahan hubungan sosial. Namun, melalui arkeologi, pokok perhatian Foucault bukan dalam rangka menunjukkan terjadinya pergeseran disposisi pengetahuan itu, melainkan bagaimana beroperasinya kekuasaan dalam membentuk suatu disposisi pengetahuan tertentu.

Karya-karya Foucault selanjutnya menunjukkan minat secara lebih besar pada persoalan kekuasaan, bukan sekedar pembentukan sebuah pengetahuan dan kebenaran sebagai *episteme*. Dalam hal ini Foucault juga memperluas cakupan penelitiannya pada bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, tidak hanya menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, perhatian Foucault selanjutnya adalah menyelidiki bagaimana teknologi kekuasaan berlaku dalam pembentukan kontrol sosial. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan bentuk kekuasaan itu sebagai *disciplinary power*, dan teknologi kekuasaan beroperasi melalui pendisiplinan tubuh. Metode yang digunakan bukan lagi arkeologi, melainkan *genealogy of power*.

Analisis genealogi Foucault dimulai dengan penyelidikan mengenai karakteristik relasi kekuasaan (*power relations*) dalam dunia modern yang bertolak dari pertanyaan “bagaimana beroperasinya kekuasaan” dan bagaimana melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Dalam pandangan Foucault, tidak ada model general hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap zaman selalu memiliki karakteristik hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Inilah yang menggugah Foucault mencuplik genealogi sebagai perangkat analisisnya yakni untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan. Berbeda dengan metode analisa yang digunakan oleh Foucault sebelumnya dari beberapa karya awalnya yang menggunakan analisa arkeologi, dalam *Archeology of Knowledge, Madness and Civilization* dan *The Order of Things* yang terbatas pada persoalan struktur wacana dalam pembentukan disposisi pengetahuan, melalui *genealogy of power* ia mempeluas penyelidikannya pada teknologi kekuasaan.

3. *Dari Arkeologi ke Genealogi*

Pergeseran minat analisa Foucault dari yang semula perhatian penyelidikannya pada bentuk formasi wacana ke penyelidikan terhadap teknologi kekuasaan, berimplikasi pada penggunaan metode, dari arkeologi ide (pengetahuan) ke genealogi kekuasaan. Karya awal Foucault yang mencuplik genealogi dalam analisisnya adalah *Discipline and Punish*. Pada karya itu, Foucault tidak lagi berbicara mengenai wacana, dan relasi diskursif sebagai prioritas kajiannya. Sebaliknya, perhatian utama Foucault terletak pada aspek relasi dan praktik-praktik yang bersifat non-diskursif, yakni pada institusi sosial dan praktik sosial. Bila perhatian utama penyelidikan arkeologi tersasar pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran manusia, maka perhatian pokok penyelidikan genealogi tertuju pada tubuh individu, yang efek-efek teknologi kekuasaan itu dapat diketahui.

Meski demikian, baik dalam *Madness and Civilization* maupun *The Birth of Clinic*, Foucault sebenarnya telah menunjukkan hubungan historis antara bentuk pengetahuan dan bentuk kekuasaan terhadap tubuh. Akan tetapi dalam analisisnya, Foucault tidak mengartikulasikan konsep hubungan kekuasaan-pengetahuan dan tanpa mengidentifikasi secara eksplisit bahwa tubuh merupakan objek relasi kekuasaan dalam masyarakat modern (Smart 2002:43). Dalam karya selanjutnya, *Discipline and Punish*, konsep relasi kekuasaan-pengetahuan dan tubuh sebagai objek beroperasinya teknologi kekuasaan termaktub secara lebih eksplisit. Dan meskipun dalam karya tersebut Foucault juga berbicara mengenai pergeseran bentuk penghukuman, lahirnya institusi penghukuman modern (penjara), tetapi fokus analisisnya adalah relasi kekuasaan-pengetahuan yang tertanam dalam tubuh, yang menundukkannya, dan menjadikannya sebagai objek pengetahuan.

Pergeseran minat dan tema analisa itu tidak berarti terdapat semacam patahan yang tidak bersambung antara karya awal dengan karya belakangan. Smart (2002) menyebutnya sebagai *re-ordering*, yakni penyusunan prioritas analisa dari yang begitu dipengaruhi oleh pemikiran strukturalis dengan tema utamanya adalah pada wacana, menjadi lebih memprioritaskan pada analisa terhadap institusi sosial, praktik sosial, teknologi kekuasaan dan teknologi diri (*technology of the self*), dan seluruh kompleksitas interelasi bentuk pengetahuan dalam hubungannya dengan praktik non-diskursif dan praktik diskursif, yakni pengetahuan dan kekuasaan, serta insitusi sosial sebagai media beroperasinya mekanisme kekuasaan dan bentuk pengetahuan yang mengkonsolidasikannya.

4. *Soverign Power, Disciplinary Power*, dan *Governmentality*

Dalam sosiologi, konsepsi tentang tubuh seringkali absen menjadi bagian dalam analisisnya. Kalaupun ada, tidak lebih tubuh dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai tubuh yang natural yang tidak memiliki asal usul sejarah dan kebudayaan pembentukannya (lihat Smart 2002). Pada konteks pemikiran Foucault, konsepsi tentang tubuh merupakan bagian yang sentral dalam beroperasinya relasi kekuasaan. Analisis genealogi memunculkan tubuh yang dipandang sebagai objek pengetahuan dan target beroperasinya kekuasaan. Konsepsi tentang tubuh diletakkan pada ranah politik, tertanam dalam relasi kekuasaan yang membuatnya menjadi patuh dan produktif serta berguna secara politik-ekonomi.

Kekuasaan yang beroperasi terhadap tubuh individu merupakan gambaran dari bentuk *disciplinary power*. *Disciplinary power* adalah teknologi kekuasaan yang dijalankan untuk

mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna. Kekuasaan model ini menurut Foucault dapat berlangsung efektif dalam institusi yang tertutup seperti penjara, rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, dan pada institusi pendidikan atau sekolah. Kekuasaan model ini pada intinya berusaha menciptakan situasi di mana tubuh individu dapat menginternalisasikan penundukan dan menjadikannya seolah sebagai suatu keadaan yang normal. Inilah yang disebut Foucault sebagai praktik normalisasi dari berlangsungnya kekuasaan terhadap tubuh individu. Konsep *disciplinary power* digunakan untuk menunjuk suatu bentuk kekuasaan dan wujud teknologi atau mekanisme beroperasinya kekuasaan itu. Konsep itu lahir sebagai hasil analisa genealogi kekuasaan Foucault terhadap operasi kekuasaan dalam masyarakat Eropa sejak abad tujuh belasan hingga abad modern.

Pada konteks negara, *disciplinary power* berlangsung dalam institusi-institusi tertutup sebagai mekanisme pengendalian individu agar dapat memberikan kegunaan bagi kepentingan negara atau pemerintah. Model kekuasaan ini sudah dapat ditemui dalam masyarakat Eropa sekitar abad 18an. Akan tetapi, dalam hal ini negara tidak hanya menjalankan model kekuasaan *disciplinary power*, tetapi juga sebagaimana konsepsi Weber tentang kekuasaan, negara menjalankan kekuasaan menggunakan model *sovereign power*, yang melandaskan legitimasi operasinya pada keabsahan hukum dan kewenangan atau hak negara dalam mengatur warganya dan sumber dayanya. Tidak seperti *disciplinary power* di mana kekuasaan dijalankan melalui cara-cara yang seringkali tidak diketahui subjeknya, *sovereign power* justru dijalankan oleh negara melalui cara-cara yang negatif. Represi dan dominasi menjadi bagian dari proses pengendalian warga negara oleh negara. Cara-cara yang negatif itu dijalankan karena negara dipandang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan itu.

Dalam masyarakat modern kini, menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *sovereign power* atau *disciplinary power*, tetapi justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara yang positif. Substansinya sebenarnya sama dengan *disciplinary power*, yakni kekuasaan itu dijalankan terhadap tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang patuh dan berguna yang hanya dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu. *Governmentality* adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk *disciplinary power*. Jika objek *disciplinary power* adalah tubuh individu, maka subjek *governmentality* adalah populasi (tubuh sosial). Bentuk pengetahuan dalam model *disciplinary power* berupa rezim kebenaran, sedangkan pada *governmentality* berupa politik ekonomi. Oleh karena *governmentality* adalah perluasan model kekuasaan *disciplinary power* pada level negara, maka yang dibicarakan dalam *governmentality* adalah isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara.

Governmentality adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau *legitimate*. Dengan ini, kekuasaan yang dijalankan negara tidak akan melahirkan anti-kekuasaan. Praktik *governmentality* mengaburkan beroperasinya kekuasaan terhadap populasi. Melalui *governmentality*, kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial seperti halnya model *disciplinary power* yang menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu.

Governmentality ini disebut juga sebagai *conduct of conduct*. Artinya, negara mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh. Sebagai bentuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, *governmentality* tidak lain dapat juga dipandang sebagai suatu cara yang

legitimate dan benar dalam mengatur sesuatu, yakni populasi dan sumber daya (*the right manner of disposition of things*).

5. Kajian Kebudayaan tentang Kekuasaan

Pandangan mengenai pergeseran model kekuasaan hegemonik Gramscian menjadi faktual (*post hegemonic*) berawal dari lontaran kritik Lash (2007) dan Couze (2007) terhadap teori kebudayaan dalam tradisi *cultural studies*. Menurut mereka, kekuasaan kini tidak lagi dijalankan secara hegemonik melalui bahasa simbolik, manipulasi ideologi, maupun wacana (dengan aparatus disiplin Foucault), tetapi telah berlangsung secara faktual. Proyek *cultural studies* awal kurang lebih dimulai dari usaha melakukan *counter culture* atau *counter discourse* terhadap budaya dan wacana dominan. Salah satu argumen pokoknya, dominasi dan penguasaan tidak selalu hadir dengan nyata dan dapat dirasakan oleh objeknya. Kajian kebudayaan berusaha memahami bagaimana proses berlangsungnya penguasaan itu, yakni yang senantiasa menempatkan manusia melulu sebagai objek.

Kadangkala penundukan dan penguasaan memang dilakukan melalui cara-cara yang represif, menekan sehingga tampak begitu jelas berlangsungnya proses dominasi itu. Akan tetapi, penundukan melalui cara-cara represif tidak selalu otomatis menghasilkan reaksi perlawanan karena berlangsungnya relasi kekuasaan yang asimetris. Di lain sisi, penundukan dan penguasaan tidak dilakukan melalui cara-cara kekerasan, tetapi secara hegemonik. Artinya penundukan tidak dirasa sebagai suatu penundukan. Berlangsungnya proses itu hanya dapat diketahui melalui efek-efeknya. Ia beroperasi pada level kesadaran. Beroperasinya kekuasaan tertanam dalam tubuh individu atau dengan kata lain, proses penundukan telah dinormalisasikan. Penundukan terhadap tubuh tidak dilakukan tanpa kepentingan, melainkan sebagai suatu usaha untuk melakukan kontrol sosial demi kepentingan tertentu. Kontrol sosial itu mengandaikan adanya penundukan dan pengawasan perilaku individu dan masyarakat.

Berlangsungnya kekuasaan yang hegemonik tidak lagi menghadirkan pengawasan secara eksternal karena ia telah diinternalisasikan dalam diri objeknya. Jadi, tidak mudah mempersoalkan suatu masalah ketika ia dianggap *given, taken for granted*, dan hadir seolah sebagai suatu yang normal. *Cultural studies* berusaha menghadirkan bahwa normalitas itu sesungguhnya mengandung persoalan. Tren atau selera, misalkan, merupakan sebuah definisi situasi terhadap kecenderungan perilaku tertentu masyarakat.

Ia mengandung persoalan karena situasi itu mengarahkan manusia pada tindakan atau cara berpikir tertentu. Kapitalisme memanfaatkan kedua hal itu, di mana perilaku konsumsi menjadi faktor yang paling penting dalam mendistribusikan hasil-hasil produksi. *Cultural studies* awal juga hadir pada konteks itu, yakni melakukan *counter culture* sebagai *counter hegemony* terhadap kecenderungan perilaku tertentu masyarakat. Konsep hegemoni sendiri juga dibangun dalam rangka merekonstruksi pandangan Marx yang telah gagal membaca kapitalisme melulu secara dominatif.

Dalam perkembangannya, hegemoni sebagai konsep penting dalam *cultural studies* mulai dipersoalkan oleh para teoretisi kebudayaan. Demikian pula pembacaan *cultural studies* terhadap mekanisme beroperasinya kekuasaan mendapat tantangan dari teori-teori kebudayaan kontemporer. Dalam satu pendapat dikatakan baik dominasi maupun hegemoni masih dalam satu asumsi teoretik yang sama dalam memandang mekanisme berlangsungnya kekuasaan itu yakni sebagai kekuasaan-terhadap (*power over*). Padahal mekanisme kekuasaan kini tidak lagi berlangsung sebagai *power over (potestas)*, melainkan sebagai *power from within (potentia)*. Ini yang belum terbaca oleh *cultural studies*, demikian dalam pandangan

Lash (2007). Dari kekuasaan berlangsung melalui aturan-aturan yang hegemonik (*hegemonic norms*) menjadi kekuasaan yang berlangsung secara faktual (*intensive facts*).

Berdasarkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam rangkaian perdebatan sekitar masa depan teori kebudayaan, kurang lebih tulisan-tulisan itu memiliki misi untuk melakukan rekonstruksi terhadap hubungan antara kebudayaan, kekuasaan, dan teori kebudayaan. Apa yang mendorong perlunya melakukan rekonstruksi ini? Menurut Venn (2007), salah satunya adalah fakta bahwa bagaimana melakukan kajian kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari isu-isu yang menjadi agenda kajian dari berbagai disiplin ilmu. Persoalan ekonomi, teknologi, identitas, lingkungan dan interelasi dinamik di antaranya tidak bisa mencampakkan kajian kebudayaan sebagai pintu masuk analisisnya.

Venn (2007) mempertanyakan kembali konsep hegemoni dalam usaha memahami kondisi lahirnya kajian kebudayaan. Pertanyaan mengenai hegemoni muncul dalam situasi ketika perlawanan terhadap kekerasan dan kekuasaan yang opresif tidak pernah berhasil, intensif, bahkan muncul sebagai suatu gerakan politik. Hegemoni terjadi ketika berlangsungnya eksploitasi oleh rezim dominan dalam mempertahankan supremasinya tanpa mempertontonkan kekuatan fisik militer sebagai sebuah teror. Konsep hegemoni digunakan secara teoritik dengan sandaran konteks sosio-politik yang berbeda. Pertama konsep hegemoni ditautkan pada konteks beroperasinya kekuasaan dalam kapitalisme Marxian seperti yang dijelaskan dalam konsep hegemoni Gramsci, yakni untuk meredakan potensi terjadinya revolusi. Yang kedua, hegemoni merujuk pada stabilisasi situasi sosio-ekonomi dalam sebuah negara bangsa.

Selanjutnya, Venn (2007) juga menerangkan terjadinya pergeseran teknologi beroperasinya kekuasaan secara teoretik maupun dalam ranah praksis. Berdiri pada perspektif Foucauldian dalam memandang kekuasaan, menurutnya kekuasaan telah bergeser dari bentuk *sovereign power* menjadi *governmentality*. *Sovereign power* adalah model kekuasaan yang dijalankan oleh negara berdasarkan kedaulatan, hukum, dan legitimasi. Konteksnya masyarakat Eropa abad pertengahan. Pada masyarakat modern, kekuasaan dijalankan melalui model pendisiplinan terhadap tubuh individu, dan secara luas terhadap populasi dalam suatu teritori tertentu. Terhadap populasi, yang dikontrol bukan lagi tubuh, tapi hidup dan mati populasi itu. Praktik pendisiplinan bertujuan memanipulasi tubuh sebagai sumber kekuatan yang menjadikannya sebagai tubuh yang berguna dan patuh. Sementara model *biopower* bertujuan mengontrol kehidupan, yakni teknologi kekuasaan yang berusaha mengendalikan efek massif karakteristik populasi, mengontrol dan mengendalikan kejadian-kejadian yang diprediksi dan dikehendaki terjadi demi suatu kepentingan tertentu.

Governmentality yang berpusat pada persoalan keamanan, populasi, dan teritori juga telah semakin mengglobal, tidak hanya menjadi persoalan lokalitas suatu negara bangsa. Justru isu di mana negara adalah penyelenggara kesejahteraan warganya menjadi dasar baginya mengendalikan populasi dan teritori sebagai wilayah beroperasinya kekuasaan itu. Interkoneksi berlangsungnya kekuasaan dengan dunia global menggambarkan bahwa kekuasaan tidak lagi beroperasi secara hegemonik melainkan telah melampauinya. Isu teritorialisasi dan keamanan suatu negara dalam konteks hubungan eksternal negara dengan dunia luar dengan membuat distingsi kawan-lawan berimplikasi pada bagaimana suatu negara memerintah atau menjalankan kekuasaannya terhadap warganya. *Governmentality* adalah rasionalisasi bagaimana negara menjalankan kekuasaannya dalam mengatur populasi.

Governmentality sebagai Post hegemonic Power

Mempersoalkan proses pembentukan subjek melalui genealogisasi subjek mengandaikan bahwa ada kondisi di mana aktor berada di antara kondisi kesadaran dan ketidaksadaran dalam menentukan pilihan tindakannya. Gramsci telah lebih dulu menunjukkan situasi ketaksadaran pada alam pikiran masyarakat atas situasi yang menindas. Situasi ketaksadaran itu yang disebutnya sebagai hegemoni, yakni dominasi yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak diketahui oleh subjek atau kelompok yang didominasi atau dihegemoni. Para pemikir dari Mazhab Frankfurt juga mengkritik persoalan serupa terhadap kapitalisme lanjut dengan mengusung kebudayaan sebagai instrumen untuk menguasai alam pikiran dan perilaku masyarakat agar dapat dikendalikan oleh kelompok dominan. Melalui penciptaan budaya massa dan pabrikisasi budaya atau yang mereka sebut sebagai *cultural industry*, kapitalisme lanjut menunjukkan kemampuannya menolak apa yang dikhawatirkan oleh Marx sebagai kehancuran akibat kontradiksi logika internal. Demikian pula kelompok pemikir dari Inggris, *cultural studies*, memandang persoalan hegemoni terdapat dalam setiap produksi dan reproduksi kebudayaan. Kurang lebih posisi intelektual di antara mereka hampir sama; kebudayaan seringkali menjadi legitimasi berlangsungnya proses penundukan dan penguasaan. Subjek yang dihegemoni tidak pernah tahu bahwa praktik sosial mereka dan cara mereka memaknai dunia sosialnya merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh kelompok dominan.

Dalam pandangan Foucault, hegemoni merupakan suatu model beroperasinya kekuasaan dari sudut pandang strategi politik, legitimasi, dan kepemimpinan intelektual dan dari *standpoint* oposisi yang terorganisasi kepada mapannya relasi kekuasaan (Foucault 2004). Foucault membedakan antara kekuasaan dan dominasi, yang dalam hal ini, hegemoni merupakan bentuk dari model dominasi. Kekuasaan dalam pengertian Foucault berbeda seperti yang umumnya dimengerti dalam perspektif Marxian atau Weberian. Kekuasaan dalam pandangan Marxian terbatas hanya pada model dominasi atau juga hegemoni dalam perspektif Gramscian. Relasi dominasi mengandaikan bahwa relasi antarsubjek tidak berlangsung secara sejajar atau seimbang. Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan (Foucault 1982a). Relasi dominasi adalah relasi kekuasaan yang stabil, hierarkis, mantap, dan sulit untuk dipertahankan.

Dalam pandangan Lash (2007), model kekuasaan *governmentality* merupakan bentuk dari operasi kekuasaan yang tidak lagi dijalankan secara hegemonik perspektif Gramscian atau *cultural studies*. Menurutnya, hegemoni merupakan bentuk dominasi yang dijalankan melalui konsensus seperti halnya melalui cara koersif. Ia disebut juga sebagai dominasi melalui ideologi atau wacana. Hegemoni adalah kekuasaan simbolik seperti konsep yang dikembangkan oleh Bourdieu. Kekuasaan dalam bentuk disiplin perspektif Foucauldian juga dimengerti sebagai kekuasaan yang hegemonik. Pada *disciplinary power* selalu ada wacana yang berdiri di belakang institusi disiplin yang mendukung beroperasinya kekuasaan dalam model ini. Institusi ini kemudian menjalankan kekuasaan yang mikro yang meresapi setiap relasi sosial. Yang mendasari semua itu sehingga bisa dijalankan adalah adanya wacana kebudayaan (*cultural discourse*) atau politisasi kebudayaan dan kekuasaan yang sah (*legitimate*). Dengan demikian, hegemoni mengandaikan dominasi simbolik, legitimasi

kekuasaan, dan institusi kekuasaan, yakni yang terdapat pada ranah relasi ekonomi, sosial, dan politik (Lash 2007). Namun kini, menurut Lash, model kekuasaan hegemonik itu telah bergeser menjadi post-hegemonik.

Kekuasaan model hegemonik dijalankan secara meluas, sebaliknya kekuasaan yang post-hegemonik dijalankan secara intensif. Pergeseran beroperasinya kekuasaan dari yang hegemonik menjadi post-hegemonik adalah pergeseran antara rezim kekuasaan yang epistemologis menjadi model kekuasaan yang ontologis, dari model kekuasaan hegemonik sebagai kekuasaan terhadap (*power over*) menjadi model kekuasaan yang intensif sebagai kekuasaan dari dalam (*power from within*), dan dari model kekuasaan dan politik dalam terminologi normatif menjadi kekuasaan yang dimengerti sebagai faktisitas atau kenyataan (Lash 2007). Konsep *governmentality* adalah cara bagaimana Foucault menjelaskan model kekuasaan yang menurut Lash sebagai post-hegemonik.

Berbagai model kekuasaan, relasi kekuasaan, dan relasi dominasi itu dijalankan dengan konsekuensi yang berujung pada pembentukan subjek. Jadi, meski Lash menyebutkan bahwa model kekuasaan kini lebih intensif dan faktual (anti-hegemoni) atau ketika Foucault mengatakan mekanisme kekuasaan dalam negara modern kini tidak hanya melalui dominasi tetapi juga *governmentality*, tetap saja yang menjadi persoalan adalah pada subjek. Analisa mengenai bagaimana model pembentukan subjek atau bagaimana mekanisme beroperasinya kekuasaan terhadap pembentukan subjek modern kini merupakan pembuka lorong bagi para pengkaji kebudayaan. Genealogi merupakan metode penelusuran sejarah yang digunakan oleh Foucault untuk mengetahui asal muasal subjek dan bagaimana mekanisme kekuasaan yang dijalankan untuk itu. Dengan kata lain, mengkaji kebudayaan tidak lain sebenarnya merupakan tugas untuk melakukan genealogisasi subjek, yakni menggali dan menganalisa subjek macam apa yang terbentuk, bagaimana sejarah terbentuknya, serta apa mekanisme kekuasaan yang dijalankan, dalam situasi tertentu (Mudhoffir 2008).

Relasi Dominasi dan Relasi Kekuasaan

Ada perbedaan yang cukup mencolok atas pandangan mengenai kekuasaan terutama dari pandangan yang masih belum bisa melepaskan pengaruh perspektif Marxian atau Weberian tentang kekuasaan dengan pandangan Foucauldian. Beberapa akademisi yang mencoba memahami pandangan Foucault tentang kekuasaan pun rupanya tidak terlalu berhasil melepaskan diri dari kerangkeng pengaruh perspektif kekuasaan negatif Marxian. Tania Li (1999a, 1999b, 2007), misalnya, memandang *governmentality* sebagai sejenis dengan hegemoni (teknologi untuk mengontrol populasi tanpa menggunakan kekerasan dan dominasi tetapi dengan memanipulasi konsensus) namun minus potensi resistensi atau anti-kekuasaan. Kita juga dapat melihat pada tulisan Amity Doolittle yang menggunakan konsep *governmentality* dalam menjelaskan relasi negara-masyarakat lokal dalam perebutan hak atas tanah sebagai cara negara mengontrol populasi dengan menciptakan mekanisme normalisasi dan pendisipinan, yang tentu saja bias dan tumpang tindih dengan konsep *disciplinary power*. Tulisan Peluso dan Watts (2001) dalam *Violent Environments* juga menunjukkan kecenderungan yang sama; memandang *governmentality* sebagai konsep relasi kekuasaan dalam medan pertarungan negara *vis a vis* masyarakat. Selanjutnya pengertian yang sama dapat kita lihat pada tulisan Paul Robbins dalam *Political Ecology* yang juga merujuk Bryant

dalam memahami *governmentality* sebagai internalisasi cara-cara koersif yang dijalankan negara terhadap populasi dengan menciptakan *self-enforcing coercion* melalui pengendalian *consent* (lihat Robins 2004).

Penulis- penulis di atas memberikan pengertian yang kurang lebih sama atas konsep *governmentality* sebagai penundukan yang dilakukan secara hegemonik sebagai mekanisme normalisasi relasi dominasi. Ini merupakan bentuk pemahaman yang tumpang tindih antara konsep *disciplinary power* dengan konsep *governmentality*. Untuk menjawab tantangan konseptual ini, kita dapat melihat pada karya Foucault *Discipline and Punish* (1975) yang menekankan pada penyelidikan mengenai rasionalisasi politik yang dijalankan negara dan tentang genealogi negara (*genealogy of the state*) (1995:139-141) (lihat Lemke 2000). Di sisi lain, kita dapat melihat karya Foucault *History of Sexuality Vol 1* (1978) yang menekankan pada penyelidikan mengenai genealogi subjek (*genealogy of the subject*). Pada karya yang pertama, Foucault berkepentingan menyelidiki bagaimana praktik kekuasaan yang dijalankan oleh negara menggunakan aparatus disiplin, sementara pada karya selanjutnya Foucault berkepentingan menyelidiki bagaimana pembentukan subjek dalam relasi kekuasaan. Yang pertama adalah usaha untuk menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan, sementara yang belakangan menunjukkan bagaimana proses subjektifikasi terhadap individu dalam relasi sosial. Menurut Lemke (2001), *missing link* di antara dua penyelidikan itu terletak problem *government*. Konsep *governmentality* digunakan oleh Foucault untuk menganalisa hubungan antara apa yang dia sebut sebagai teknologi diri (*technology of the self*) dengan teknologi dominasi memahami *everyday form of resistance* melainkan model *symbolic violence* Bourdieu dan *hegemony* Gramsci. (*technology of domination*), dan pembentukan subjek (*constitution of the subject*) dengan formasi negara (*formation of the state*).

Pandangan di atas dapat membantu menjelaskan perbedaan antara relasi kekuasaan dengan relasi dominasi. Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Sebaliknya, *governmentality* merupakan bentuk kontrol atau pengendalian diri (*self-government*) yang membentuk dan menghasilkan ranah kemungkinan pilihan tindakan subjek. Konsep kekuasaan ini tidak mengeksklusi bentuk konsensual (hegemoni) atau pilihan penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan dan model konsensual telah direformulasi menjadi elemen dalam pengendalian antarsubjek dalam relasi sosial. Metode-metode koersi dan konsensus itu merupakan elemen atau instrumen daripada fondasi atau sumber relasi kekuasaan (Foucault 1982b: 219-222). Menurut Lemke (2000:4) *governmentality* merupakan konsep kekuasaan yang digunakan oleh Foucault untuk mempelajari kapasitas otonom individu melakukan kontrol diri dan bagaimana hal itu berkaitan dengan politik dan eksploitasi ekonomi negara. *Governmentality* adalah konsep kekuasaan yang digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara teknologi diri (*power from below*) dengan teknologi dominasi (*power from above*).

Relasi dominasi mengandaikan bahwa relasi antarsubjek tidak berlangsung secara sejajar atau seimbang. Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau

menentukan pilihan suatu tindakan (Foucault 1982a). Relasi dominasi adalah bentuk dari relasi kekuasaan yang stabil, hierarkis, mantap, dan sulit untuk dipertahankan.

Perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi dapat pula diketahui dengan melihat bahwa ada model relasi kekuasaan lainnya, yakni relasi kekuasaan sebagai *strategic games between liberties*. Beroperasinya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi, tetapi ia tidak berarti bahwa kekuasaan ini dijalankan bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari relasi kekuasaan itu; dan pada konteks ini juga tidak signifikan untuk mengatakan bahwa menentukan tindakan orang lain (*to determine the conduct of other*) adalah buruk. Relasi kekuasaan yang dijalankan dalam model ini dapat kita amati pada upaya-upaya melalui apa yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*) atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu agar dapat menjadi subjek yang bebas dalam mengambil keputusan dalam berbagai ranah tindakan (Foucault 1982a).

Model relasi kekuasaan lainnya adalah *governmentality*. Model ini berada di antara *strategic games* dan dominasi. *Governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct-of-conduct*, suatu relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang mengarahkan tindakan orang lain atau cara bagaimana orang lain berperilaku dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan yang sangat terbuka (Foucault 1982b). Menjalankan relasi kekuasaan dalam model ini juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi ranah pilihan tindakan dari yang lain. Dengan demikian, ada tiga level analisa kekuasaan, yakni yang dipahami sebagai relasi strategi, *governmentality*, dan dominasi –yang biasanya disebut sebagai kekuasaan.

Sementara itu, Li dan beberapa penulis yang disebut di atas menyamakan *governmentality* dengan hegemoni atau dominasi yang dinormalisasikan melalui *consent*, bukan sebagai teknik dalam relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan itu terdapat dalam setiap relasi sosial, karena itu kekuasaan tidak memusat dan tidak pula termiliki, tetapi ia tersebar: bukan karena merengkuh segalanya tetapi karena ia berasal dari manapun. Relasi dominasi mengandaikan bahwa subjek subordinat memiliki pilihan tindakan yang sangat terbatas, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan. Sedangkan relasi kekuasaan memberikan banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Conduct of conduct* bukan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara (lihat Foucault 1982:138-141).

Pemilihan tindakan itu bukan karena paksaan atau ketidaksadaran alam pikiran yang diarahkan oleh hegemoni dan manipulasi ideologi, melainkan secara potensial seorang individu menentukan pilihan tindakan yang sesungguhnya dikehendaki oleh negara. Dengan demikian, *governmentality* sesungguhnya adalah gambaran tentang mekanisme kekuasaan yang dapat mewujudkan dalam setiap relasi sosial, bukan sekedar relasi negara dengan masyarakat seperti dalam pandangan Marx atau Gramsci. Hanya saja, memang relasi kekuasaan yang tampaknya hanya berurusan dengan relasi antar subjek ternyata semakin dipengaruhi oleh negara. Maka relasi kekuasaan yang berlangsung dalam setiap relasi sosial

sesungguhnya *inheren* di dalamnya pengaruh kepentingan-kepentingan negara. Menurut Foucault, relasi kekuasaan kini sudah semakin dipengaruhi dan terus-menerus berada di bawah kontrol negara. Inilah mengapa kemudian Foucault (1982a: 141-142) menyebut model relasi kekuasaan itu dengan *governmentality* karena memang relasi kekuasaan semakin digovernmentalisasi (*governmentalized*):

Secara sederhana perbedaan antara relasi dominasi dan relasi kekuasaan dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Model Relasi Kekuasaan

Unsur-unsur	Model Relasi Kekuasaan	
	Relasi Dominasi	Relasi Kekuasaan (<i>governmentality</i>)
Model relasi	Unequal relation of power	Equal relation of power
Aktor	State-society, powerful-powerless, dominan-marginal	Between subject, between individuals
Aparatus	Dominasi and hegemony (disciplinary power and symbolic violence)	Governmentality
Teknologi	Violence and ideological manipulation, consent	Conduct of conduct
Basis relasi	Domination vanish freedom	Freedom is basis of power relation

C. KESIMPULAN

Konsep kekuasaan Foucauldian sesungguhnya telah menghadirkan tantangan terhadap ilmu politik dan sosiologi politik terutama dalam memahami konsep kekuasaan. Sosiologi politik kerap kali melihat kekuasaan sebagai atribusi, kapasitas, ataupun modal yang dimiliki atau digenggam seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Persoalannya, praktik penundukan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak akan mudah ditangkap jika hanya menyelidiki pada sumber penundukan yang berasal dari kekuasaan atributif. Bentuk-bentuk penundukan sebagai wujud praktik kekuasaan jauh lebih kompleks dan rumit. Cara-cara negatif dan kasat mata tidak akan membuat dominasi menjadi mapan dan bertahan. Tetapi dengan memanipulasi keinginan-keinginan, ideologi, dan hasrat sulit dapat membangkitkan rasa mawas diri seseorang, sehingga penundukan dan eksploitasi terasa sebagai kenikmatan dan candu.

Teknik yang lebih canggih bahkan telah meniadakan keberadaan aktor dominan dengan aktor yang didominasi karena praktik penundukan terjadi dalam relasi strategis yang kompleks. Tidak ada dominasi. Pemenjaraan atas kehendak dan kebebasan pun nihil. Namun, justru melalui kebebasan praktik-praktik sosial dapat melanggengkan eksploitasi dan penundukan diri. Praktik kekuasaan ini tidak kasat mata dan hampir mustahil dapat tertangkap melalui kacamata teori kekuasaan yang umum digunakan dalam diskursus politik. Di sinilah letak keunggulan teori kekuasaan Foucault; ia menyediakan preparat yang lebih canggih dalam memotret realitas kekuasaan yang kompleks dan rumit itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Raymon L dan Sinead Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. London: Routledge.
- Callewaert, Staf. 2006. "Bourdieu, Critic of Foucault: The Case of Empirical Social Science Against Double-Game-Philosophy". *The-ory, Culture and Society*, Vol. 23 (6): 73-98.
- Cronin, Ciaran. 1996. "Bourdieu and Foucault on Power and Moder-nity". *Philosophy Social Criticism*, Vol. 22: 55-85.
- Curtis, Bruce. 2002. "Foucault on Governmentality and Population: The Impossible Discovery". *Canadian Journal of Sociology*, Vol. 27 (4): 505-533.
- Deacon, Roger. 2002. "An Analytics of Power Relations: Foucault on The History of Discipline". *History of The Human Science*, Vol. 15 (1): 89-117.
- Doolittle, Amity A. 2005. *Property and Politics in Sabah, Malaysia: Native Struggles over Land Rights*. Seattle and London: University of Washington Press.
- Edelman, Marc dan Angelique Haugerud. 2005. *The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism*. USA: Blackwell Publishing.
- Faultks, Keith. 1999. *Political Sociology: Critical Introduction*. Edin-burgh: Edinburgh University Press.
- Foucault, Michel. 2003. *Society must be Defended*. UK: Penguin Books.
- . 1990. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. New York: Vintage Books.
- . 1984. *The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1983. *Structuralism and Post-Structuralism*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.
- . 1982a. *Technology of The Self*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1982b. *The Subject and Power*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. New York: Phanteon Books.
- . 1978a. *Governmentality*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1978b. *Security, Territory, and Population*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- . 1977. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Vintage Books.
- . 1973. *The Birth of The Clinic: An Archaeology of Medical Per-ception*. London and New York: Routledge.
- . 1970. *The Order of Things: An Archaeology of The Human Sci-ence*. New York: Vintage Books.
- . tanpa tahun. *Security, Territory, Population; Lectures at The Col-lege de France*. New York: Palgrave MacMillan.
- Fraser, Nancy. 2003. *From Discipline to Flexibilization? Rereading Fou-cault in the Shadow of Globalization*. Blackwell Publishing, Vol. 10 (2): 160-171.
- Hannigan, John. 2006. *Environmental Sociology; Second Edition*. New York: Routledge.
- Lash, Scott. 2007. "Power after Hegemony; Cultural Studies in Muta-tion?". *Theory, Culture and Society*, Vol. 24 (3): 55-78.

- Lemke, Thomas. 2000. *Foucault, Governmentality, and Critique*. Pa-per presented at the *Rethinking Marxism Conference*, University of Amherst, September 21-24.
- Li, Tania Muray. 1999. "Compromising Power: Development, Cul-ture, and Rule in Indonesia". *Cultural Anthropology*, Vol. 14 (3): 295-322.
- . 1999. *Transforming the Indonesian Upland: Marginality, Power, and Production*. OPA. Netherland.
- . 2007. *The Will To Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. London: Duke University Press.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2008. "Berebut Kebenaran: Governmental-ity pada Kasus Lapindo". *Tesis*. Universitas Indonesia.
- . 2008. "Politik Kebudayaan: Manufakturisasi Korban Lumpur Lapindo". *Jurnal Pesantren Ciganjur*, Vol. 5 (3): 41-55.
- Peluso, Nancy dan Michael Watts. 2001. *Violent Environment*. Ithaca: Cornell University.
- Rabinow, Paul and Nicolas Rose. 2003. *The Essential Foucault: Selec-tions from Essential Work of Foucault, 1954-1984*. London: The New Press.